

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 51 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 20 DESEMBER 2016  
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT, CALON APARATUR SIPIL NEGERA, APARATUR SIPIL NEGERA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON APARATUR SIPIL NEGERA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

**CONTOH FORMAT SPPD**

SKPD .....			
SURATPERINTAH PERJALANANDINAS(SPPD)			
1	Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan/Anggota DPRD>Nama PNS dan NIP/PTT yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a . b	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a .	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a . b	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Akun	a .	
10	Keterangan lain-lain		
Coret yang tidak perlu		Dikeluarkan di Tanggal Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  (.....) NIP.	

	I. Berangkatdari : (TempatKedudukan) Ke : PadaTanggal : Kepala
II. Tibadi : PadaTanggal : Kepala  (.....) ...) NIP	Berangkatdari : Ke : PadaTanggal : Kepala (.....) .....) NIP
III. Tibadi : PadaTanggal : Kepala  (.....) ...) NIP	Berangkatdari : Ke : PadaTanggal : Kepala (.....) .....) NIP
IV. Tibadi : PadaTanggal : Kepala  (.....) ...) NIP	Berangkatdari : Ke : PadaTanggal : Kepala (.....) .....) NIP
V. Tibadi : PadaTanggal : Kepala :  (.....) NIP	Berangkatdari : : Ke : PadaTanggal : Kepala (.....) .....) NIP
VI. Tibadi : (TempatKedudukan) PadaTanggal :  PenggunaAnggaran/Ku asaPenggunaAnggaran (.....) NIP	Telahdiperiksadenganketeranganbahwaperjala nantersebutatasperintahpejabat yang berwenangdansemata- matauntukkepentinganjabatandalamwaktuyang gsesingkat- singkatnya.  PenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaran (.....)
VII. CatatanLain-Lain	
VIII. PERHATIAN: PenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaranyangmenerbitkanSPPD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, PimpinandanAnggota DPRD, PNS dan PTTyangmelakukanperjalanandinas, parapejabatyangmengesahkantanggalberangkat/tiba, sertabendahrapengeluaranbertanggungjawabberdasarkanperaturan- peraturanKeuanganDaerahapabiladaerahmenderitarugiakibatkesalahan, kelalaian,	

Pih. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN



LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 51 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 DESEMBER 2016

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT, CALON APARATUR SIPIL NEGERA, APARATUR SIPIL NEGERA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON APARATUR SIPIL NEGERA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

**CONTOH RINCIAN BIAYA PERCALANAN DINAS**

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Terbilang			

....., tanggal, bulan, tahun

Telah dibayar sejumlah  
.....

Telah menerima jumlah uang sejumlah Rp.....

Bendahara Pengeluaran/  
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Yang Menerima

(.....)  
NIP.

(.....)  
NIP.

**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp.....

Yang telah dibayar semula : Rp.....

Sisakurang/lebih : Rp.....

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  
(.....)

NIP

**PIh. GUBERNUR SULAWESI BARAT,**  
ttd

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 51 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 DESEMBER 2016

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT, CALON APARATUR SIPIL NEGERA, APARATUR SIPIL NEGERA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON APARATUR SIPIL NEGERA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

**KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN**

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Transportasi Pegawai	Biaya Penginapan	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemeliharaan dan Angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	√	√	Sesuai penguasaan	-
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	√	√	√	Sesuai penguasaan	-
c. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh uji dinas / ujian jabatan.	√	√	√	Sesuai penguasaan	-
d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugas.	√	√	√	Sesuai penguasaan	-
e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	√	√	√	Sesuai penguasaan	-
f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	√ <sup>3)</sup>	√ <sup>2)</sup>	√ <sup>1)</sup>	Sesuai penguasaan	-
g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan	√	√	√	Sesuai penguasaan	√
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.	√	√	√	Sesuai penguasaan	√

Keterangan:

- √<sup>1)</sup> : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.
- √<sup>2)</sup> : Biaya Transportasi diberikan selama melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan.
- Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf h: uang harian, biaya transportasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT / keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.

**PIh. GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. ISMAIL ZAINUDDIN**



LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 51 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 20 DESEMBER 2016  
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT, CALON APARATUR SIPIL NEGERA, APARATUR SIPIL NEGERA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON APARATUR SIPIL NEGERA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

**CONTOH DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

DAFTAR PENGELUARAN RIIL		
Yang bertandatangan dibawah ini:		
Nama	: .....	
NIP	: .....	
Jabatan	: .....	
berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor..... tanggal ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:		
1. Biaya transport pejabat/pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:		
No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksudkan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.		
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Mengetahui/Menyetujui:		....., tanggal, bulan, tahun
Peguna Anggaran/ Kuasa Penguasa Anggaran,		Pelaksana SPPD,
.....		.....
NIP.....		NIP.....

**Plh. GUBERNUR SULAWESI BARAT,**  
ttd

**H. ISMAIL ZAINUDDIN**

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 51 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 DESEMBER 2016

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT, CALON APARATUR SIPIL NEGERA, APARATUR SIPIL NEGERA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON APARATUR SIPIL NEGERA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

1

FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPPD DAN KELUARGA

PELAKSANA SPPD	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi;	A	Bisnis	VIP/ Kelas IA	Spesial/ Eksekutif	Sesuai kenyataan
Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, dan Fungsional Golongan IV/c keatas, Tenaga Ahli dan Staf Khusus;	B	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai kenyataan
Pejabat Eselon III atau PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV atau PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I serta pejabat lainnya yang setara;	C	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan
Pejabat Eselon IV dan Fungsional Golongan III/c dan Gol. III/b;	D	Ekonomi	Kelas IIB	Eksekutif	Sesuai kenyataan
Non Eselon Gol. IV, Gol. III dan yang disetarakan serta Pejabat Fungsional dan PTT Golongan III/a dan III/b;	E	Ekonomi	Kelas IIB	Eksekutif	Sesuai kenyataan
Non Eselon Gol. I dan Gol. I PTT, Non PNSD dan yang disetarakan	F	Ekonomi	Kelas IIIA	Ekonomi	Sesuai kenyataan

PIh. GUBERNUR SULAWESI BARAT,  
ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 51 TAHUN 2016  
TANGGAL : 20 DESEMBER 2016  
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT, CALON APARATUR  
SIPIL NEGERA, APARATUR SIPIL NEGERA, PEGAWAI TIDAK TETAP  
DAN NON APARATUR SIPIL NEGERA PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

---

#### SATUAN VOLUME PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG

URAIAN/TUJUAN	GOLONGAN PELAKSANA SPPD			
	GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C & D	GOLONGAN E & F
Jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan				
1. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25m <sup>3</sup>	20m <sup>3</sup>	15m <sup>3</sup>	10m <sup>3</sup>
2. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15m <sup>3</sup>	12m <sup>3</sup>	9m <sup>3</sup>	6m <sup>3</sup>
3. Pegawai yang tidak berkeluarga	5m <sup>3</sup>	4m <sup>3</sup>	3m <sup>3</sup>	2m <sup>3</sup>

Plh. GUBERNUR SULAWESI BARAT,  
ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN



LAMPIRAN XII: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 51 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 DESEMBER 2016

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT, CALON APARATUR SIPIL NEGERA, APARATUR SIPIL NEGERA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON APARATUR SIPIL NEGERA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

**CONTOH SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN**

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN  
NOMOR.....

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :.....(1)  
NIP :.....(2)  
Jabatan :.....(3)  
Unit Kerja :.....(4)  
SKPD :.....(5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama :.....(6)  
NIP :.....(7)  
Jabatan :.....(8)  
Unit Kerja :.....(9)  
SKPD :.....(10)

dibatalakan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu.....  
.....(11).....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut,  
pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/PNS/PTT lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

..... (12)

Yang Membuat Pernyataan

..... (13)





PETUNJUK PENGISIAN FORMAT  
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

- (1) Diisina mapejabat penerbit Surat Tugas
- (2) Diisi NIP pejabat penerbit Surat Tugas
- (3) Diisi jabatan penerbit Surat Tugas
- (4) Diisina nama Unit Kerja penerbit Surat Tugas
- (5) Diisina nama SKPD penerbit Surat Tugas
- (6) Diisina nama Pelaksana SPPD
- (7) Diisi NIP Pelaksana SPPD
- (8) Diisi jabatan Pelaksana SPPD
- (9) Diisina nama Unit Kerja Pelaksana SPPD
- (10) Diisina nama SKPD Pelaksana SPPD
- (11) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- (12) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
- (13) Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat penerbit Surat Tugas

**PIh. GUBERNUR SULAWESI BARAT,  
ttd**

**H. ISMAIL ZAINUDDIN**

LAMPIRAN XIII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 51 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 20 DESEMBER 2016  
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT, CALON APARATUR SIPIL NEGERA, APARATUR SIPIL NEGERA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON APARATUR SIPIL NEGERA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

**CONTOH SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN  
 BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama .....(1)  
 NIP .....(2)  
 Jabatan .....(3)  
 Unit Kerja .....(4)  
 SKPD .....(5)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ..... tanggal..... dan SPPD Nomor ..... tanggal..... atas nama:

Nama .....(6)  
 NIP .....(7)  
 Jabatan .....(8)  
 Unit Kerja .....(9)  
 SKPD .....(10)

Dibatalakan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor..... tanggal.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa .....(11)..... dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/ *refund* (sebagian/ seluruhnya) sebesar Rp..... (12) ....., sehingga dibebankan pada DPA-SKPD Nomor: ..... tanggal..... Unit Kerja..... (13).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benarkan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian andaera tersebut ke Kas daerah.

..... (14)

Yang Membuat Pernyataan

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT  
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN  
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

- (1) Diisi nama PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinas nya
  - (2) Diisi NIP PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinas nya
  - (3) Diisi jabatan PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinas nya
  - (4) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinas nya
  - (5) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinas nya
  - (6) Diisi nama Pelaksana SPPD
  - (7) Diisi NIP Pelaksana SPPD
  - (8) Diisi jabatan Pelaksana SPPD
  - (9) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinas nya
  - (10) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinas nya
  - (11) Diisi transport yang digunakan
  - (12) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transport dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/  
*refund* sebagian/seluruhnya
  - (13) Diisi nomor DPA-SKPD, tanggal, dan nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinas nya
  - (14) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan
- Diisi tentang dan nama jelas PA/KPA pada SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinas nya

**Plh. GUBERNUR SULAWESI BARAT,**  
**ttd**

**H. ISMAIL ZAINUDDIN**